

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	x
<b>DAFTAR PUTUSAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	14
3. Tujuan Penelitian .....	14
4. Manfaat Penelitian .....	14
5. Kerangka Teoritis.....	15
5.1. Teori Perundang-Undangan .....	15
5.2. Teori Penjenjangan Norma .....	26
5.3. Teori Keberlakuan Hukum .....	32
6. Metode Penelitian .....	42
6.1. Tipe Penelitian .....	42
6.2. Pendekatan Penelitian .....	42
6.3. Bahan Penelitian .....	43
6.4. Pengumpulan Bahan Hukum .....	44
6.5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum.....	45
7. Sistematika Penulisan .....	45

<b>BAB II Kriteria Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)....</b>	<b>47</b>
2.1. Konsep Hukum Pembentukan Perpu.....	47
2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Perpu .....	47
2.1.2. Hakikat Perpu Sebagai Peraturan Perundang-Undangan .	54
2.2. Kriteria Hukum Pembentukan Perpu Untuk Membatasi Subjektifitas Pemerintah Dalam Pembentukan Perpu .....	62
2.3. Pembentukan Perpu Dalam Menjawab Kesenjangan Hukum .....	92
<b>BAB III Dasar Keberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Untuk Menjamin Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum .....</b>	<b>95</b>
3.1. Validitas Norma Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .....	95
3.2. Keberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum .....	110
3.3. Akibat Hukum Keberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) .....	114
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>119</b>
4.1. Kesimpulan .....	119
4.2. Saran .....	120

## DAFTAR BACAAN

## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Badan Rehabilitas dan Rekontruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Perikanan Sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 71 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitas dan Rekontruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 100 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

## DAFTAR PUTUSAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 94/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1-2/PUU-XII/2014 Perihal pengujian Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 Tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.